

Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Desa yang Berkelanjutan: Sebuah Studi Literatur Kasus-kasus di Indonesia

Rinto Z.W. Abidjulu¹, Feliks Arfid Guampe^{2*}, Join Hengkeng³

¹Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi,
Universitas Kristen Tentena, Indonesia

^{2,3}Fakultas Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan,
Universitas Kristen Tentena, Indonesia

*Email: rinto.aba@gmail.com¹, feliksquampe@gmail.com², joinhengkengposo@gmail.com³

Alamat: Jl. Torulemba No 21. Tentena

Korespondensi penulis: feliksquampe@gmail.com*

Abstract. *The purpose of this study is to analyze the important role of village heads in achieving sustainable village development in Indonesia. The study employs a qualitative research approach, utilizing a literature review method to explore and synthesize various studies, articles, journals, and reports related to the village heads' roles. The data collection was conducted through a systematic literature search using relevant keywords such as "village head role," "sustainable village development," "community participation," "local resource management," "village-owned enterprises (BUMDes)," and "SDGs in villages." The gathered data were then analyzed using thematic analysis to identify key themes related to the village heads' roles in managing development, encouraging community participation, and implementing sustainable development policies. The study concludes that village heads play a multifaceted role in planning and managing village development, facilitating community participation, and ensuring transparent and accountable management of village funds. However, challenges remain, particularly in terms of corruption risks and equitable community participation. The findings emphasize the need for improved capacity building for village heads and stronger support from the government to achieve sustainable development goals at the village level.*

Keywords: Village Head, Sustainable Development, Community Participation, Village Fund Management, Local Resource Management.

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran penting kepala desa dalam mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode tinjauan literatur untuk mengeksplorasi dan mensintesis berbagai studi, artikel, jurnal, dan laporan terkait peran kepala desa. Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur yang sistematis dengan menggunakan kata kunci yang relevan seperti "peran kepala desa," "pembangunan desa berkelanjutan," "partisipasi masyarakat," "pengelolaan sumber daya lokal," "BUMDes," dan "SDGs di desa." Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait peran kepala desa dalam mengelola pembangunan, mendorong partisipasi masyarakat, dan menerapkan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepala desa memainkan peran multifaset dalam merencanakan dan mengelola pembangunan desa, memfasilitasi partisipasi masyarakat, dan memastikan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait risiko korupsi dan partisipasi masyarakat yang merata. Temuan ini menekankan perlunya peningkatan kapasitas kepala desa dan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

Kata kunci: Kepala Desa, Pembangunan Berkelanjutan, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Dana Desa, Pengelolaan Sumber Daya Lokal.

1. LATAR BELAKANG

Kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, kepemimpinan kepala desa tidak hanya berfungsi sebagai pengelola pemerintahan desa, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan mobilisator masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Sebagai pemimpin lokal, kepala desa memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat. Penelitian telah menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam implementasi pembangunan berkelanjutan. Kepala desa memainkan peran penting dalam mendorong dan memfasilitasi partisipasi ini, memastikan bahwa masyarakat tidak hanya terlibat, tetapi juga merasa memiliki tanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada. Melalui pendekatan partisipatif ini, proyek-proyek yang dilaksanakan menjadi lebih berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluruh komunitas (Supriadi, 2021; Sutrisna, 2021).

Selain itu, kepala desa juga memegang peran strategis dalam pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lokal. Dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada, kepala desa dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan program-program pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya lokal terbukti efektif dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam hal ini, kepala desa juga bertugas untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak terbarukan, yang pada gilirannya akan mendukung upaya pembangunan berkelanjutan di tingkat desa (Rahmi, 2023; Djafri et al., 2021; Antono et al., 2020; Gultom, 2020).

Aspek lain yang tidak kalah penting dalam peran kepala desa adalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Kepala desa yang kompeten dalam mengelola dana desa dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, yang sangat penting untuk menciptakan kepercayaan di kalangan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman kepala desa tentang anti-korupsi dan transparansi dapat berdampak positif terhadap keberhasilan program-program pembangunan desa (Mada et al., 2017; Mahardhika, 2023).

Di tengah tuntutan global untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, kepala desa juga dihadapkan pada kebutuhan untuk beradaptasi dengan kebijakan dan regulasi yang relevan, seperti Sustainable Development Goals (SDGs). Kepala desa yang mampu memahami dan mengimplementasikan SDGs dalam program-program pembangunan desa dapat secara signifikan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan bagi kepala desa dalam memahami kebijakan-kebijakan ini menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa (Sutrisna, 2021; Lamangida et al., 2017; Horna, 2024).

Secara keseluruhan, peran kepala desa dalam pembangunan desa yang berkelanjutan sangat kompleks dan multidimensional. Kepala desa tidak hanya bertindak sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai penggerak perubahan yang mampu mengintegrasikan partisipasi masyarakat, pengelolaan sumber daya, akuntabilitas, dan kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam setiap aspek pembangunan desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengelaborasi peran kepala desa dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan berdasarkan studi literatur kasus-kasus di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode review literatur. Metode ini dipilih untuk memahami secara mendalam peran kepala desa dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan melalui analisis literatur yang relevan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas dan kedalaman isu yang terkait dengan kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat, pengelolaan sumber daya, serta implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa (Agustini et al., 2023; Sugiyono, 2017).

Penelitian ini merupakan studi literatur yang mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai penelitian, artikel jurnal, buku, dan laporan terkait yang berfokus pada peran kepala desa dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Desain ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tema penelitian melalui penelusuran berbagai sumber akademik yang sudah ada. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah artikel-artikel ilmiah, yang digunakan diambil dari berbagai database akademik seperti Google Scholar. Literatur yang dipilih untuk dianalisis harus memenuhi kriteria relevansi dengan topik penelitian, mutakhir (5-10 tahun terakhir), dan memiliki kredibilitas tinggi.

Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis literatur yang relevan dengan menggunakan kata kunci seperti "peran kepala desa", "pembangunan desa berkelanjutan", "partisipasi masyarakat", "pengelolaan sumber daya lokal", "BUMDes", dan "SDGs di desa". Proses pencarian ini melibatkan pemilihan literatur yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyaringan literatur untuk mengeliminasi studi yang tidak relevan.

Data yang terkumpul dari berbagai literatur dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Proses ini melibatkan identifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur, seperti peran kepala desa dalam pengelolaan pembangunan, partisipasi masyarakat, dan implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. Analisis tematik dilakukan dengan memetakan hubungan antara berbagai tema tersebut untuk memahami peran kompleks kepala desa dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran kepala desa dalam pembangunan desa di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu perencanaan dan pengelolaan pembangunan, komunikasi organisasi, partisipasi masyarakat, pengelolaan dana desa, serta kepemimpinan dan akuntabilitas. Setiap aspek ini berkontribusi terhadap keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan di desa-desa di seluruh Indonesia.

Perencanaan dan Pengelolaan Pembangunan

Kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan desa. Dalam kasus Desa Wates, misalnya, kepala desa bertanggung jawab dalam membuat rencana pembangunan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat, memberikan arahan kepada bawahannya, mengambil keputusan penting, mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan, serta mengawasi aktivitas pemerintahan desa (Ningrum et al., 2021). Penelitian ini menegaskan bahwa peran kepala desa dalam proses ini sangat signifikan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat, yang merupakan prinsip dasar dari pembangunan yang berkelanjutan.

Selain peran administratif dan pengambilan keputusan, kepala desa juga bertindak sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Penelitian menunjukkan bahwa kepala desa tidak hanya berfungsi sebagai pengarah, tetapi juga berperan aktif dalam menginspirasi dan

memotivasi masyarakat untuk terlibat dalam setiap aspek pembangunan, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi (Pilaili et al., 2022; Lamangida et al., 2017). Dalam hal ini, kepala desa menjadi penggerak utama yang memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat, sehingga pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif dan inklusif.

Tanggung jawab kepala desa tidak berhenti pada pengelolaan pembangunan saja; mereka juga harus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk partisipasi masyarakat. Ini mencakup pengembangan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya desa secara optimal. Di Desa Ciangsana, misalnya, kepala desa berperan dalam mendorong munculnya ide-ide baru yang relevan dengan kebutuhan lokal, serta bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk merumuskan kebijakan dan peraturan yang mendukung pembangunan berkelanjutan (Roza & S, 2018; Apriani & Sakban, 2019). Kerjasama antara kepala desa dan BPD sangat penting untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat diakomodasi dalam setiap kebijakan yang diambil.

Namun, peran kepala desa tidak lepas dari tantangan, terutama terkait dengan risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala desa dapat menghambat proses pembangunan dan merugikan masyarakat (Mahardhika, 2023). Oleh karena itu, penting bagi kepala desa untuk memiliki integritas yang tinggi serta kesadaran etis dalam mengelola dana dan sumber daya desa. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengawasan efektif dari BPD menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa (Wibisono, 2017; Astariyani et al., 2023).

Dengan demikian, peran kepala desa dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan desa adalah peran yang kompleks dan menuntut kepemimpinan yang efektif. Kepala desa harus mampu menjadi penggerak pembangunan yang tidak hanya mengarahkan tetapi juga memfasilitasi partisipasi masyarakat, sekaligus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kepala desa berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

Komunikasi Organisasi dan Partisipasi Masyarakat

Komunikasi organisasi yang efektif oleh kepala desa sangat penting dalam membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Komunikasi yang baik dari kepala desa tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam pembangunan, tetapi juga memperkuat demokrasi lokal dan

kualitas kebijakan yang dihasilkan. Penelitian menunjukkan bahwa ketika kepala desa berhasil melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik, hal ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam setiap tahap pembangunan desa (Sepyah, 2022; Mar'ah et al., 2022).

Di Desa Kedungrejo, kepala desa berhasil memainkan peran sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator dengan menggunakan komunikasi yang efektif untuk mendukung partisipasi masyarakat. Sebagai motivator, kepala desa memberikan dukungan moral dan motivasi kepada masyarakat dan pejabat desa, mendorong mereka untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Sebagai fasilitator, kepala desa menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada kebutuhan masyarakat setempat. Sebagai mobilisator, kepala desa menggerakkan seluruh elemen desa untuk berkontribusi dalam pembangunan, menciptakan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat (Salma et al., 2021).

Namun, dalam kasus Desa Julah, meskipun kepala desa telah berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat, tingkat partisipasi tetap rendah, terutama di kalangan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat desa. Ini mencerminkan tantangan geografis dan komunikasi yang menjadi hambatan signifikan dalam meningkatkan partisipasi secara merata. Meskipun ada upaya dari kepala desa, faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses pengambilan keputusan dan keterbatasan fasilitas serta sumber daya manusia turut berperan dalam menghambat partisipasi masyarakat (Mulyani et al., 2018); Arisandi, 2021; Harfis, 2019).

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, seperti dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sering kali terbatas pada tahap pengusulan program tanpa keterlibatan dalam pengambilan keputusan akhir. Hal ini menunjukkan perlunya strategi komunikasi yang lebih inklusif dari kepala desa untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mendengar, tetapi juga terlibat secara aktif dalam semua tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (Cahyono & Mufidayati, 2021; Ramadhan & Ma'ruf, 2022).

Strategi komunikasi yang efektif, yang mencakup penggunaan berbagai saluran komunikasi dan transparansi informasi, sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa ketika kepala desa secara aktif mengedukasi masyarakat dan melibatkan mereka dalam proses penyusunan anggaran serta kebijakan desa, hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat secara signifikan (Jusman et al.,

2022; Adam et al., 2019). Dukungan dari lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah juga dapat memperkuat kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi, menjadikan pembangunan desa lebih inklusif dan berkelanjutan (Supriatna, 2023; Rachman et al., 2022).

Secara keseluruhan, komunikasi yang baik antara kepala desa dan masyarakat, disertai dengan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam partisipasi masyarakat, merupakan kunci untuk mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, kepala desa dapat menciptakan kebijakan yang lebih relevan, membangun kepercayaan, dan meningkatkan kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pengelolaan Dana Desa dan Akuntabilitas

Pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu tanggung jawab utama kepala desa yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan desa yang berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana ini dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa serta pembangunan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi lokal (Abdullah et al., 2022; Mardiana et al., 2020; Mulyono et al., 2021). Kepala desa di Sumberbrantas, misalnya, telah berusaha keras memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendatangkan layanan kesehatan sebagai bentuk kepedulian terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat (Suwando & Adiwidjaja, 2019).

Namun, pengelolaan dana desa sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Penelitian di Kecamatan Essang menunjukkan bahwa kepala desa tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa, yang menyebabkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Kurangnya pelaporan yang transparan berkontribusi pada kegagalan program-program yang telah direncanakan, yang pada akhirnya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan menghambat keberlanjutan pembangunan (Madea et al., 2017). Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya kepala desa untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam pengelolaan keuangan agar dapat

menghindari penyalahgunaan dan meningkatkan transparansi (Surahman, 2023; Haikal, 2024).

Akuntabilitas kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa juga mencakup kewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan dana, sehingga masyarakat merasa memiliki hak untuk mengawasi penggunaan dana tersebut. Pelaporan penggunaan dana kepada pemerintah daerah dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan BPD dalam pengawasan guna memastikan bahwa kepala desa bertanggung jawab atas setiap keputusan terkait pengelolaan dana (Agustina, 2020; Rachmawati, 2024). Dengan adanya keterlibatan masyarakat dan BPD, diharapkan proses pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat.

Namun, dalam praktiknya, kepala desa sering kali menghadapi kendala seperti kurangnya dukungan dari pemerintah dan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dan penyuluhan mengenai pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas kepala desa dan perangkat desa lainnya, sehingga pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan lebih baik dan efektif (Flambonita et al., 2022; Andriani & Zulaika, 2019; Kairupan et al., 2021). Dengan peningkatan kapasitas ini, diharapkan kepala desa dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik, berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan desa yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, peran kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa dan akuntabilitasnya sangat krusial. Kepala desa tidak hanya bertanggung jawab atas penggunaan dana, tetapi juga harus memastikan bahwa proses pengelolaan dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan. Dengan demikian, kepala desa dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Kepemimpinan dan Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala desa memainkan peran penting dalam keberhasilan pembangunan desa, terutama dalam hal efektivitas pengambilan keputusan dan peningkatan partisipasi masyarakat. Di Mojorejo, misalnya, kepala desa yang mengadopsi gaya kepemimpinan demokratis berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Gaya kepemimpinan yang demokratis ini memungkinkan kepala desa untuk memotivasi

masyarakat, mensosialisasikan program-program pembangunan, dan menerima masukan serta saran untuk perbaikan, yang pada akhirnya memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan (Bagus & Sasmito, 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kepemimpinan demokratis dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa, sebagaimana ditemukan oleh Rahmannuddin dan Sumardjo, yang menekankan pentingnya kepemimpinan yang kuat dalam mendorong partisipasi masyarakat (Rahmannuddin & Sumardjo, 2018).

Di Desa Uma Beringin, kepemimpinan kepala desa yang terbuka dan demokratis terlihat jelas melalui rutinitas musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Komunikasi yang efektif dan transparan ini memungkinkan kepala desa untuk mengelola pembangunan desa dengan lebih baik, sehingga pembangunan fisik berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang ditetapkan (Supriadi, 2021). Penelitian oleh Kotalaha et al. (2021) juga menggarisbawahi pentingnya gaya kepemimpinan yang mampu memadukan berbagai pendekatan untuk mencapai konsensus dalam masyarakat, yang mencerminkan betapa krusialnya peran kepala desa dalam pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh komponen desa.

Gaya kepemimpinan kepala desa juga dapat dipahami dari perspektif otonomi desa dan struktur sosial yang ada. Pemilihan kepala desa serentak di Rokan Hilir, misalnya, menunjukkan tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip demokrasi, terutama terkait diskriminasi dalam persyaratan pencalonan yang dapat mempengaruhi legitimasi pemimpin di tingkat desa (Rudiadi & Herawati, 2017). Ini menunjukkan bahwa efektivitas kepemimpinan tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan individu kepala desa, tetapi juga oleh kerangka aturan dan struktur sosial-politik yang ada dalam masyarakat.

Selain itu, dalam konteks pembangunan desa yang berkelanjutan, gaya kepemimpinan transformasional menjadi sangat penting. Kepemimpinan transformasional berfokus pada pengembangan potensi masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan. Safaruddin (2023) menekankan bahwa kepemimpinan transformasional mampu menginspirasi dan memotivasi masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kombinasi antara kepemimpinan transformasional dan berbasis komunitas dapat meningkatkan keberhasilan pengembangan desa wisata, yang menegaskan pentingnya fleksibilitas dalam penerapan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan lokal (Rakhman et al., 2021).

Secara keseluruhan, kepemimpinan kepala desa di Indonesia mencerminkan dinamika yang kompleks antara gaya kepemimpinan, partisipasi masyarakat, dan konteks sosial-politik yang ada. Gaya kepemimpinan yang demokratis dan transformasional terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan. Namun, tantangan dalam pemilihan kepala desa dan struktur sosial yang ada perlu diatasi untuk menciptakan kepemimpinan yang lebih inklusif dan efektif, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan partisipatif.

Tantangan dan Peluang dalam Pembangunan Desa

Pembangunan desa di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang kompleks, yang memerlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan. Tantangan utama dalam pembangunan desa sering kali berkaitan dengan ketidakmerataan perkembangan, keterbatasan sumber daya, dan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola dana dan program pembangunan. Sebagai contoh, penelitian oleh menunjukkan bahwa untuk mencapai desa yang maju dan mandiri, diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi (Listyawati et al., 2023). Selain itu, menekankan bahwa kebijakan pembangunan desa yang diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 menunjukkan perhatian pemerintah yang tinggi, namun juga menciptakan tantangan baru bagi pemerintah desa dalam implementasinya (Setyadiharja et al., 2018).

Salah satu tantangan signifikan adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. mencatat bahwa pembangunan desa tidak hanya harus fokus pada aspek fisik, tetapi juga pada pembangunan non-fisik yang melibatkan penyuluhan dan peningkatan pengetahuan masyarakat (Syaputri, 2022). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap proses pembangunan. menyoroti bahwa pengelolaan dana desa sering kali tidak optimal karena rendahnya kemampuan individu aparatur pemerintah desa dalam mengelola dana tersebut, yang mengakibatkan kinerja pembangunan yang tidak maksimal (Mulyono et al., 2021).

Di sisi lain, terdapat peluang yang signifikan dalam pembangunan desa, terutama melalui inisiatif yang berfokus pada keberlanjutan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Agustina dan Yahya menemukan bahwa pembangunan desa yang efektif dapat berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan di kabupaten (Agustina & Yahya, 2022). Selain itu, pengembangan agritourism dan produk lokal juga dapat menjadi

pendorong ekonomi yang kuat, seperti yang dijelaskan oleh , meskipun penelitian ini berfokus pada konteks Romania dan mungkin tidak sepenuhnya relevan untuk konteks Indonesia (Adamov et al., 2020). menambahkan bahwa inovasi dalam gastronomi yang menggabungkan tradisi dan modernitas dapat mempromosikan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan (Kilibarda, 2023).

Pentingnya kebijakan yang konsisten dan terkoordinasi juga menekankan bahwa kebijakan yang mendukung pariwisata dan pengembangan ekonomi lokal harus saling mendukung untuk mencapai keberlanjutan (Khan et al., 2020). Selain itu, Ahlmeyer dan Volgmann mencatat bahwa tren eksternal seperti kebijakan Uni Eropa dan kesadaran lingkungan yang meningkat memberikan lebih banyak peluang bagi daerah pedesaan untuk regenerasi dan pengembangan yang berkelanjutan (Ahlmeyer & Volgmann, 2023). Secara keseluruhan, pembangunan desa di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan, namun juga menawarkan peluang yang besar untuk inovasi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, termasuk peningkatan kapasitas pemerintah desa dan partisipasi masyarakat, pembangunan desa dapat menjadi motor penggerak untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa kepala desa memegang peran yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan di Indonesia. Keberhasilan pembangunan desa tidak hanya bergantung pada kemampuan kepala desa dalam merencanakan dan mengelola pembangunan, tetapi juga pada kemampuannya untuk berkomunikasi secara efektif, melibatkan masyarakat, mengelola dana desa dengan transparan, dan menerapkan gaya kepemimpinan yang mendukung partisipasi masyarakat. Meski demikian, tantangan dalam hal partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan dana desa masih perlu diatasi untuk mencapai pembangunan yang benar-benar berkelanjutan. Dengan demikian, untuk meningkatkan keberlanjutan pembangunan desa, perlu adanya peningkatan kapasitas kepala desa dalam aspek-aspek tersebut, serta dukungan yang lebih besar dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam memberikan pelatihan dan pendampingan yang diperlukan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, A., Junaedi, J., & Sanusi, S. (2022). Akuntabilitas kepala desa terhadap pengelolaan anggaran dana desa. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(11), 17035-17054. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i11.11946>
- Abidin, Z. (2023). Tinjauan fiqh siyasah dan undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa mengenai peran kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa. *JIS*, 1(3), 268-281. <https://doi.org/10.61341/jis/v1i3.022>
- Adam, L., Munawar, A., & Irwan, I. (2019). Pengaruh kepemimpinan terhadap partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan. *Jakpp (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 1(2), 144-164. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v1i2.7977>
- Adeliya, N., Widodo, R., & Zuriah, N. (2017). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes) di desa Rejotangan, kecamatan Rejotangan, kabupaten Tulungagung. *Jurnal Civic Hukum*, 2(2), 42. <https://doi.org/10.22219/jch.v2i2.6864>
- Agustina, M. (2020). Pertanggungjawaban kepala desa dan peran badan permusyawaratan desa. *Jurnal Yustitiabelen*, 6(2), 36-57. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v6i2.244>
- Agustina, R., & Yahya, A. (2022). Pembangunan desa dan tingkat kemiskinan kabupaten di Indonesia. *Jurnal Litbang Sukowati Media Penelitian Dan Pengembangan*, 6(1), 98-108. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v6i1.329>
- Agustini, G., Putra, S., Sukarman, Guampe, F. A., Akbar, J. S., Lubis, M. A., Maryati, I., Ririnisahwaitun, Mesra, R., Sari, M. N., Tuerah, P. R., Rahmadhani, M. V., & Rulangi, R. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*. PT. Mifandi Mandiri Digital.
- Ahlmeier, F., & Volgmann, K. (2023). What can we expect for the development of rural areas in Europe?—Trends of the last decade and their opportunities for rural regeneration. *Sustainability*, 15(6), 5485. <https://doi.org/10.3390/su15065485>
- Apriani, R., & Sakban, A. (2019). Kinerja badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *Civics Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 34. <https://doi.org/10.31764/civics.v6i2.672>
- Ardiyansyah, C. (2022). Gaya kepemimpinan, kearifan lokal, dan akuntabilitas bumdes. *Dekat*, 1(2), 38-55. <https://doi.org/10.24246/dekat.v1i2.9953>
- Arisandi, R. (2021). Peran pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa Kulo. <https://doi.org/10.31219/osf.io/rgaxc>
- Astariyani, N., Nurmawati, M., Utari, A., & Danyanthi, A. (2023). Peran dan fungsi badan perwakilan desa dalam penetapan kebijakan di desa Bongan Kabupaten Tabanan. *Jurnal Abdi Insani*, 10(1), 440-449. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v10i1.928>

- Bagus, N., & Sasmito, C. (2021). Peranan gaya kepemimpinan kepala desa terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Reformasi*, 11(2), 233–243.
- Cahyono, H., & Mufidayati, K. (2021). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 173-194. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.176>
- Djafri, N., Pauweni, A., & Badu, S. (2021). Strategi manajemen kepemimpinan kepala desa melalui pendampingan berkelanjutan peran SDGs desa dalam peningkatan pemberdayaan tipologi desa di kawasan pesisir. *Jurnal Solma*, 10(3). <https://doi.org/10.22236/solma.v10i3.7233>
- Fitriati, R. (2023). Transformational leadership in times of crisis: Study of handling COVID-19 in Bumi Raja-Raja. *Jurnal Bina Praja*, 15(2), 289-308. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.289-308>
- Flambonita, S., Ridwan, R., Ahmaturrahman, A., & Apriyani, L. (2022). Pengelolaan dan informasi perencanaan anggaran desa. *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, 5(4), 378-394. <https://doi.org/10.29303/jppm.v5i4.4227>
- Gultom, A. (2020). Pengembangan potensi sumber daya alam di desa Ulak Pandan Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 36-46. <https://doi.org/10.51622/pengabdian.v1i1.65>
- Haikal, A. (2024). Transparansi dana desa dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 122. <https://doi.org/10.31258/jkp.v15i1.8449>
- Harfis, H., & Afrizal, D. (2019). Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 1(2), 30-37.
- Horna, M. (2024). Peran kepala kampung dalam implementasi kebijakan dana kampung distrik Manimeri. *Lentera: Multidisciplinary Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.57096/lentera.v2i2.81>
- Khan, A., Bibi, S., Ardito, L., Lyu, J., & Babar, Z. (2020). Tourism and development in developing economies: A policy implication perspective. *Sustainability*, 12(4), 1618. <https://doi.org/10.3390/su12041618>
- Kilibarda, N. (2023). Fusing gastronomy and rural development within sustainable food systems. <https://doi.org/10.15308/sitcon-2023-89-95>
- Kotalaha, N., Wawointana, T., & Langkai, J. (2021). Gaya kepemimpinan kepala desa dalam pengambilan keputusan di desa Bakun Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administro Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara*, 2(2). <https://doi.org/10.36412/jan.v2i2.2511>
- Lamangida, T., Akbar, M., & Hasan, H. (2017). Kepemimpinan kepala desa dalam membangun desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(1), 68. <https://doi.org/10.31314/pjia.6.1.68-78.2017>

- Listyawati, R., & Hayati, N. (2023). Determinasi faktor utama dalam ketidakmerataan perkembangan desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Plano Buana*, 3(2), 100-111. <https://doi.org/10.36456/jpb.v3i2.7092>
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Goodwill*, 8(2). <https://doi.org/10.358>